

IMPLEMENTASI PROGRAM PENATAAN BANTARAN SUNGAI DI KAWASAN JALAN BRIGJEN KATAMSO KABUPATEN SINTANG

Oleh:
AYA ISMAYA
NIM: E.01110035

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak
Email: ayaismaya@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian tentang implementasi program penataan bantaran sungai di kawasan jalan Brigjen Katamso Kabupaten Sintang antara lain seperti infrastruktur yang tidak memadai, kondisi lingkungan yang kumuh, tidak adanya kejelasan wewenang, PKL yang tidak teratur dan tumpang tindih aktifitas dikawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dari Van Mater dan Van Horn's sebagai pedoman dalam mengkaji permasalahan yang terdapat dalam implementasi program penataan bantaran sungai di kawasan jalan Brigjen Katamso Kabupaten Sintang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa variabel yang mempengaruhi proses implementasi mengingat implementasi program penataan bantaran sungai di kawasan jalan Brigjen Katamso tidak berjalan sesuai dengan rencana teknis. Variabel tersebut adalah kondisi sumberdaya yang kurang berkualitas, karakteristik agen pelaksana yang belum menonjol, kurangnya sikap/kecenderungan (*dispositon*) para pelaksana serta belum adanya komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana yang baik serta kondisi lingkungan fisik, sosial dan ekonomi kawasan bantaran sungai di jalan Brigjen Katamso. Variabel lain yang mempengaruhi proses implementasi seperti kondisi tim kerja, koordinasi dan interaksi para pelaksana, keterlibatan pihak swasta, komitmen pemerintah dan juga kesadaran masyarakat akan pentingnya penataan ruang. Pemerintah Kabupaten Sintang terutama dinas Pekerjaan Umum perlu meningkatkan sumberdaya terutama sumberdaya manusia dan harus mempunyai komitmen dalam menyelesaikan masalah penataan ruang.

Kata kunci: implementasi program, penataan bantaran sungai, Brigjen Katamso

ABSTRACT

The problems that contained in this research about implementation of ordering program along riverbank in the Brigjen Katamso area, Sintang such as inadequate infrastructure, environmental conditions that slums, lack of clarity in authority, irregular street vendors and overlapping activities on that area. This research is use descriptive qualitative approach. The theory that use is by Van Mater and Van Horn's as a guide in examine the problems contained in the implementation of ordering program along riverbank in the Brigjen Katamso area, Sintang. The results showed that there are several variables that affect the implementation process, considering the implementation of ordering program along riverbank in the Brigjen Katamso area is not run in accordance with the technical plan. That variables are the conditions of less qualified resources, the characteristics of the implementing agencies are not prominent, the lack of attitude / tendency (dispositon) the executor also the lack of communication between organizations and implementing activities that not good also the condition of the physical environment, social and economic of the road along the river Brigjen Katamso area. Other variables that affect the implementation process such as teamwork conditions, coordination and interaction of the executive, the involvement of the private sector, government commitment and also public awareness of the importance of the ordering planning. Government of Sintang area need to increase the resource especially human resource and they must to comitment to solve the problem of ordering space.

Keywords : Implementation program, ordering riverbank , Brigjen Katamso.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya.

Penataan terhadap wilayah kabupaten diperlukan supaya tertata dengan baik sesuai fungsinya. Dalam peraturan daerah Kabupaten Sintang nomor 5 tahun 2002 tentang rencana detail tata ruang kota sintang sampai dengan 2010, tujuan kebijakan penataan ruang kota dan wilayah adalah untuk mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan, kemampuan daya dukung, pertumbuhan dan perkembangan Kota Sintang serta mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang sejalan dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah. Sedangkan dalam substansi raperda rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sintang disebutkan tujuan penataan ruang Kabupaten Sintang adalah terbagi menjadi 4 yaitu:

- a. untuk mewujudkan Kabupaten Sintang yang aman, produktif, dan berkelanjutan melalui pengembangan wilayah berbasis perkebunan karet dan kelapa sawit sebagai komoditi unggulan.
- b. Kawasan perbatasan sebagai kawasan khusus pertahanan dan keamanan

serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya.

- c. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan untuk pembangunan berkelanjutan.
- d. Keterpaduan antara perencanaan tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten.

Kawasan pasar Sungai Durian merupakan salah satu wilayah pusat kegiatan perekonomian Kabupaten Sintang. Saat ini kondisi kawasan tersebut merupakan gerbang awal untuk kunjungan para pendatang dari berbagai daerah dengan bermacam-macam kepentingan baik ekonomi politik dan sosial masyarakat. Wilayah yang telah sekian lama ada ini keadaan lingkungan sosialnya telah membaaur dengan budaya setempat, dari penuturan diatas termasuk beberapa sarana prasarana lingkungan yang mendukung proses berjalannya roda ekonomi di wilayah ini pun telah usang dan sebagian besar sudah tidak berfungsi dengan baik antara lain jaringan jalan yang rusak, saluran drainase kota yang rusak, pola perparkiran yang semeraut, pola pedagang kaki lima yang tidak teratur, akses kegiatan pelabuhan sungai yang tidak berorientasi, serta akses pejalan kaki yang tidak terakomodasi dengan baik.

Kawasan jalan Brigjen Katamso di sungai durian juga termasuk kawasan kumuh dikarenakan banyaknya masyarakat yang tinggal di tepi sungai dengan membangun bangunan yang tidak permanen sekaligus sebagai tempat usaha. Hal ini tentu menjadikan kawasan tersebut terlihat jelek dan kotor. Selain itu juga terdapat warung remang-remang yang seharusnya tidak dibangun ditepi sungai tersebut. Banyaknya faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk menjadikan bantaran sungai sebagai

tempat usaha dan pemukiman ilegal antara lain yaitu urbanisasi, ekonomi yang rendah, rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, tidak adanya aturan yang tegas dari pemerintah dan lain-lain.

Pemerintah Kabupaten Sintang telah melakukan pertemuan dengan masyarakat maupun para pedagang kaki lima yang ada di kawasan tepian sungai jalan Brigjen Katamso tersebut. Masyarakat dan para pedagang siap untuk dilakukan penataan asalkan mereka mendapatkan tempat alternatif lain selama penataan berlangsung. Namun sampai sekarang belum juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sintang. Tata kota merupakan bagian dari kewenangan tata ruang dan tata ruang sendiri menjadi wewenang dari dinas Pekerjaan Umum. Namun pada tahun 2010 hingga 2012 tata kota menjadi bagian dari dinas Kebersihan Pertamanan Pertambangan dan Kebakaran. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kaidah dari tata kota itu sendiri yang mana sesuai dengan kementriannya merupakan bagian dari pekerjaan umum. Oleh karena itu pada tahun 2013 bidang tata kota di dinas Kebersihan, Pertamanan, Pertambangan dan Kebakaran dipindahkan dan disatukan dengan bidang tata ruang di dinas Pekerjaan Umum. Perpindahan dan penyatuan tersebut dikarenakan terjadi kelebihan kapasitas pada dinas Kebersihan, Pertamanan, Pertambangan dan Kebakaran.

Oleh karena itu penelitian ini memfokuskan pada hasil daripada implementasi program penataan bantaran sungai di kawasan jalan Brigjen Katamso Kabupaten Sintang serta hambatan dalam mengimplementasikan program tersebut, dengan rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi program penataan bantaran sungai di kawasan jalan Brigjen Katamso.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi program penataan bantaran sungai di kawasan jalan Brigjen Katamso Kabupaten Sintang dan hambatan yang terjadi dalam pengimplementasian program tersebut.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Implementasi Kebijakan

Van Horn dan Van Meter (dalam Agustinus Leo, 2008:139) mengartikan implementasi kebijakan sebagai *“those actions by public and private individual (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”*, yang berarti tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi atau pelaksanaan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa pelaksanaan, suatu kebijakan hanyalah sekedar sebuah dokumen yang tak bermakna dalam kehidupan masyarakat atau kebijakan-kebijakan hanya berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Pelaksanaan sangat penting dalam suatu pemerintahan dan mekanisme operasional kebijakan tidak hanya berkaitan dengan prosedur-prosedur teknis administratif belaka, tetapi juga berkaitan dengan masalah-masalah politik seperti konflik keputusan, dan tanggapan kelompok sasaran. Pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dalam analisis implementasi kebijaksanaan adalah bagaimana cara kebijakan tersebut dilaksanakan? Bagaimana interaksi antara

orang-orang atau kelompok-kelompok yang terlibat? Siapa yang secara formal diberi wewenang melaksanakan program dan siapa yang secara informal lebih berkuasa dan mengapa? Bagaimana cara atasan mengawasi bawahan dan cara mengkoordinasikan mereka? Bagaimana tanggapan dari *target groups*?

2. Kebijakan Tata Ruang Kota

Adapun yang dimaksud tentang Rencana Tata Ruang Kota dalam peraturan pemerintah RI nomor 69 tahun 1996 tentang pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang meliputi:

- a. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya.
- b. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
- c. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- d. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
- e. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
- f. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.
- g. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat

permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Dalam kajian penataan ruang nasional, program penataan ruang dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu kawasan atau wilayah dengan cara mewujudkan keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antar sektor dan antar wilayah dalam jangka panjang dan secara berlanjut disesuaikan kecenderungan perkembangan sosial dan ekonomi kawasan atau wilayah terkait. Kebijakan bidang penataan ruang meliputi; a) menyusun kebijakan penataan ruang nasional yang memiliki kepastian hukum melalui proses penataan ruang yang berkualitas, b) melakukan koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam penyelenggaraan penataan ruang nasional, c) mengembangkan mekanisme penyelenggaraan penataan ruang yang partisipatif berbasis kemitraan dalam penyusunan kebijakan penataan ruang, dan d) meningkatkan kapasitas perilaku dan lembaga penyelenggaraan penataan ruang.

3. Model – Model Implementasi

Model pertama adalah model yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Model ini juga disebut “A model of the policy implementation”. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel berikut:

1. Ukuran dan Tujuan kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak

menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi. Ukuran dan tujuan kebijakan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan.

2. Sumber daya

Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

3. Komunikasi antar organisasi

Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan. Komunikasi menjadi penting agar implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut.

4. Karakteristik agen pelaksana

Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn juga mengungkapkan bahwa karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.

5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung

keberhasilan implementasi kebijakan. Perubahan lingkungan memberikan pengaruh yang besar terhadap implementasi suatu kebijakan. Perubahan lingkungan dapat mempengaruhi interpretasi suatu kebijakan sehingga dengan demikian dapat berpengaruh terhadap cara pelaksanaan programnya

6. Disposisi implementor

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tindakan kinerja implementasi kebijakan publik. Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu:

- a. respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan;
- b. kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan;
- c. Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

4. Sungai dan Bantaran Sungai

Menurut kamus istilah lingkungan sungai adalah bagian dari muka bumi yang karena sifatnya menjadi tempat air mengalir dan mata air. Sedangkan pada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 1991 pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan air mulai dari mata air sampai muara dibatasi kanan kirinya serta sepanjang Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 1991 pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa bantaran asungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam. Sedangkan menurut Newson,

Malcolm (1997), bantaran sungai adalah daerah yang merupakan area jarak lalu lintas limbah air banjir sungai, dan kemungkinan merupakan bagian dari kapasitas daya tampung banjir. Daerah bantaran sungai juga merupakan daerah kawasan lindung yang perlu dijaga kelestariannya. Ang pengalirannya oleh garis sempadan.

5. Kinerja

Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa lepas dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau yang dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Berdasarkan pengertian diatas, aparatur dalam pencapaian kinerja harus memiliki kemampuan dan motivasi kerja. Kemampuan yang dimiliki aparatur dapat berupa kecerdasan ataupun bakat. Motivasi yang dimiliki aparatur dilihat melalui sikap dan situasi kerja yang kondusif, karena hal ini akan berhubungan dengan pencapaian prestasi kerja atau kinerja aparatur pada lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung (observasi), wawancara terstruktur dan studi kepustakaan. Metode

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis. Sehingga dengan metode ini dapat mendeskripsikan serta menganalisa variabel yang ada dalam mengimplementasikan program penataan bantaran sungai di kawasan jalan Brigjen Katamso.

Lokasi penelitian ini dilakukan di kawasan bantaran sungai disepanjang jalan Brigjen Katamso dan di kantor dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang. Waktu penelitian ini dimulai dari akhir bulan Oktober 2013 sampai dengan Oktober 2014. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pihak dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, yang terdiri dari kepala dinas pekerjaan umum, kepala bidang tata ruang dan tata kota serta staf yang berkaitan dengan bidang tata ruang kota. Kemudian pengguna kawasan bantaran sungai disepanjang jalan Brigjen Katamso yang terdiri dari pedagang dan masyarakat sekitar. Sedangkan objek penelitiannya adalah implementasi program penataan kawasan bantaran sungai disepanjang jalan Brigjen Katamso. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan instrument penelitian yaitu peneliti sendiri, alat perekam serta kamera digital untuk mendapatkan data yang lengkap dari semua pihak yang terkait sehingga data yang diperoleh dapat menjawab semua permasalahan yang diteliti. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif memberikan ulasan atau interpretasi terhadap data dan informasi yang diperoleh, sehingga menjadi lebih bermakna daripada sekedar penyajian dalam bentuk angka-angka

(numeric). Ada tiga hal yang dilakukan dalam analisa data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yang peneliti gunakan adalah triangulasi. Triangulasi menurut Moleong (2007:330) adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan terhadap data atau sebagai pembanding terhadap data itu.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Penataan Bantaran Sungai Di Kawasan Jalan Brigjen Katamso Kabupaten Sintang

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dari implementasi suatu kebijakan adalah ukuran dan tujuan kebijakan. Ukuran dan tujuan kebijakan tata ruang kota Kabupaten Sintang tentu harus jelas agar tujuan dari terciptanya kebijakan tersebut dapat terealisasi dengan baik. Tujuan dari penataan ruang itu sendiri adalah supaya terciptanya harmonisasi antara alam dengan lingkungan sekitar sehingga berdampak bagi kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat sekitarnya. Hal ini sesuai dengan sasaran dari program penataan bantaran sungai di kawasan jalan Brigjen Katamso, penataan kawasan tersebut yaitu teridentifikasinya elemen-elemen kota yang potensial untuk pengembangan kawasan dan menganalisis serta mengembangkan potensi guna menghidupkan fungsi ruang

kawasan, dengan memperhatikan unsur-unsur ekonomi dan variasi komponen kota.

Kebijakan tata ruang Kabupaten Sintang disusun berdasarkan undang undang nomor 26 Tahun 2007, tetapi juga ada undang-undang lain dibidang penataan ruang dan pengelolaan sumber daya alam. Program penataan bantaran sungai di kawasan Brigjen Katamso disusun berdasarkan kebijakan penataan ruang Kabupaten Sintang yang termasuk dalam pelestarian kawasan strategis. Namun disamping itu juga harus disesuaikan lagi tujuan program tersebut supaya jelas dan terarah sehingga hasilnya baik untuk kedepannya.

b. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan aspek penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Sumberdaya disini bukan hanya sumberdaya manusia, tetapi juga sumberdaya modalnya. Suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik apabila sumberdaya manusianya memiliki kualitas yang baik. Karena semakin baik kualitas sumberdaya manusia semakin baik hasil pelaksanaan kebijakan tersebut. Jumlah sumberdaya yang harus dimiliki dinas/organisasi tergantung seberapa banyak tugas yang harus dilaksanakan oleh mereka. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang memiliki tugas yang berat karena berkaitan langsung dengan aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Sintang, oleh karena itu perlu memiliki

sumber daya yang benar-benar berkualitas dan ahli dibidangnya. Sumberdaya aparatur dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang menurut pangkat dan golongan dimana terdapat 4 orang yang menduduki pangkat golongan IV. 53 orang menduduki pangkat golongan III, dan 45 orang menduduki pangkat golongan II, dan 2 orang yang menduduki pangkat golongan I. Sedangkan pegawai Non PNS (Homor Rutin) pada Dinas Pekerjaan Umum berjumlah 10 orang. Dapat diambil kesimpulan bahwa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang memiliki 114 pegawai dimana 10 pegawai merupakan non Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sedangkan tenaga kerja yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 104 orang. Dalam program penataan bantaran sungai di kawasan jalan Brigjen Ktamsop Kabupaten Sintang memerlukan 4 tenaga ahli yaitu ahli arsitektur, ahli perencanaan kota, ahli teknik sipil serta ahli sosiologi. Untuk ahli arsitektur dan teknik sipil hampir rata-rata pegawai di dinas Pekerjaan Umum ahli di bidang tersebut. akan tetapi untuk ahli perencanaan kota dinas pekerjaan Umum hanya mempunyai satu ahli saja. Selain tenaga ahli, dibutuhkan juga tenaga kerja pendukung seperti operator komputer, operator AutoCAD (penggambaran digital), staff administrasi dan office boy.

Selain sumberdaya manusianya (SDM), ada sumberdaya lain yang tidak kalah penting dalam menunjang

keberhasilan suatu implementasi kebijakan maupun programnya. Sumberdaya tersebut adalah sumberdaya modal. Selama ini alokasi dana untuk Dinas Pekerjaan Umum bisa dikatakan mencukupi dan terkelola dengan baik. Tetapi tidak hanya modal, ada juga sarana dan prasarana yang memadai sehingga pelaksanaan implementasi dapat berjalan dengan baik. Sarana dan prasarana yang mendukung akan menjadikan proses implementasi tersebut berjalan lancar. Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang sarana dan prasarana dalam menunjang pekerjaan memadai namun kondisi dari sarana dan prasarana tersebut hanya sebagian yang dapat digunakan dengan baik. Tentu hal ini mengganggu dalam pelaksanaan pekerjaannya. Selain sumberdaya manusia dan modal, sumberdaya waktu juga mempengaruhi dalam proses implementasi program. Sumberdaya waktu diperlukan untuk menentukan seberapa lama proses pelaksanaan program tersebut dan menyesuaikan dengan dana yang dibutuhkan selama waktu proses pelaksanaannya. Program penataan bantaran sungai di kawasan jalan Brigjen Katamso yang perencanaan penataannya dimulai pada tahun 2012 dilaksanakan selama kurun waktu 60 hari kalender, yang mana seharusnya sudah selesai dikerjakan tetapi terkendala oleh beberapa masalah. Hal ini membuktikan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang belum bisa memanfaatkan

waktu dalam proses implementasi dari program penataan tersebut.

c. Komunikasi antar Organisasi

Komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam melakukan suatu kerjasama dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan. Kegiatan komunikasi salah satunya dapat dilakukan dengan koordinasi. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak – pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka asumsi terjadinya kesalahan – kesalahan akan menjadi sangat kecil. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang sebagai agen pelaksana kebijakan harus mempunyai kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan aktor – aktor lain yang terlibat dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Karena dalam pelaksanaan implementasi program penataan bantaran sungai ini tidak hanya melibatkan dinas Pekerjaan Umum tetapi juga dinas lain seperti dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). Dalam penelitian ini peneliti hanya mewawancarai dan mengobservasi dinas Pekerjaan Umum dikarenakan dinas Pekerjaan umum merupakan aktor utama dalam pelaksanaan implementasi program penataan bantaran sungai di kawasan jalan Brigjen Katamso. Program penataan bantaran sungai dikawasan jalan Brigjen Katamso

Kabupaten Sintang yang telah bergulir sejak 2010 di dinas Kebersihan namun menjadi terhambat dikarenakan adanya pemindahan wewenang bidang tata ruang kota pada tahun 2012 ke dinas Pekerjaan Umum. Oleh karena itu dinas Pekerjaan Umum perlu komunikasi dan koordinasi dengan dinas Kebersihan mengenai sejauh mana program penataan bantaran sungai dikawasan jalan Brigjen Katamso telah mereka laksanakan. Seperti yang telah disebutkan di latar belakang masalah, dinas kebersihan telah melakukan musyawarah dan dialog dengan masyarakat di kawasan bantaran sungai mengenai rencana penataan kawasan tersebut. dan dinas Kebersihan juga telah membuat rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam penataan kawasan bantaran sungai di jalan Brigjen Katamso. Oleh karena itu dinas Pekerjaan Umum perlu melakukan komunikasi dengan dinas Kebersihan mengenai rencana penataan dengan melanjutkan apa yang telah dilaksanakan oleh dinas Kebersihan. Dengan adanya komunikasi serta koordinasi yang baik, maka apa yang diinginkan akan tercapai. Dan untuk itu para aktor-aktor kebijakan tersebut diharapkan mempunyai kemampuan yang baik sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Karakteristik Implementor

Ciri-ciri daripada implementor atau agen pelekasana sangat mempengaruhi kinerja dari implementasi kebijakan. Tujuan yang hendak dicapai dalam suatu kebijakan hendaknya disesuaikan dengan karakteristik implementornya atau agen pelaksananya. Semakin luas tujuan maupun wilayah dari suatu kebijakan yang hendak di implementasikan maka semakin besar pula implementor atau agen pelaksana yang akan mengimplementasikan tersebut. Program penataan bantaran sungai disepanjang jalan Brigjen Katamso wilayah implementasinya hanya pada kawasan jalan tersebut yaitu dengan luas wilayah pengamatan + 7,69 Ha dan ± 2 Ha area luas daerah perencanaan. Jika melihat dari luas wilayah yang hanya sepanjang jalan tersebut maka implemetor yang diperlukan tidaklah terlalu banyak. Akan tetapi jika melihat struktur wilayah dari kawasan tersebut diperlukan implementor yang ahli terutama dibidang arsitektur, sipil, penataan ruang serta sosiologi dan juga tenaga pendukung lainnya. Jumlah pegawai pada dinas Pekerjaan Umum yang sebanyak 114 orang diharapkan mampu mengimlementasikan program tersebut dengan baik.

e. Disposisi Implementor

Sikap penerimaan atau penolakan dari implementor akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tindakan kinerja implementasi kebijakan publik. Hal

ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Program penataan bantaran sungai di kawasan jalan Brigjen Katamso merupakan program yang dibuat pemerintah demi mengembalikan kawasan tersebut agar sesuai fungsinya. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa dinas Pekerjaan Umum selaku implementor utama dalam program ini telah cukup paham tentang bagaimana ukuran dan sasaran program penataan bantaran sungai di kawasan jalan Brigjen Katamso sehingga tidak adanya sikap penolakan dalam pelaksanaan program tersebut. Hal ini dilihat dari pemahaman pegawai dinas Pekerjaan Umum tentang penataan runag dan perencanaan kegiatan penataan bantaran sungai di kawasan jalan Brigjen Katamso.

f. Lingkungan

Lingkungan adalah realitas diluar kebijakan publik yang mempengaruhi kebijakan publik. Kebijakan publik adalah suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik serta menyangkut orang banyak. Aktivitas manusia yang meningkat dari tahun ke tahun dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem maupun struktur wilayah di kawasan jalan Brigjen Katamso tersebut. Oleh sebab itu, perlu ada upaya menjaga kelestarian lingkungan melalui penataan ruang dengan berbagai aturan dan persyaratan. Lingkungan sangat besar pengaruhnya dalam implementasi suatu kebijakan. Dalam kebijakan penataan ruang yang mempengaruhi kinerja implementasi tersebut bisa dilihat dari kondisi geografis, sosial, ekonomi, politik dan budaya. Kondisi geografis kawasan jalan Brigjen Katamso merupakan kawasan strategis dan berkembang. Namun kawasan tersebut juga rawan bencana seperti banjir longsor maupun abrasi.

Selain kondisi geografis, kondisi lingkungan sosial ekonomi politik serta budaya yang tidak kondusif juga akan mempengaruhi kinerja dari implementor tersebut. Lingkungan sosial bisa berarti dengan adanya dukungan serta peran serta masyarakat dalam implementasi program tersebut. Karena apabila masyarakat mendukung pelaksanaan program itu maka kinerja para implementor akan semakin baik dalam

mengimplementasikannya.

Demikian juga dari sisi ekonomi, politik serta budaya. Semua kondisi lingkungan tersebut diharapkan kondusif sehingga ketika para implementor melaksanakan tugasnya akan berpengaruh pada kinerja mereka. Semakin baik kinerja para implementor semakin baik pula hasil dan tujuan dari program yang di implementasikan akan tercapai.

Adapun hal lain yang mempengaruhi proses dalam mengimplementasikan program penataan bantaran sungai di kawasan Brigjen Katamso ialah:

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas yang berarti merupakan tanggungjawab. Akuntabilitas sangat mempengaruhi kinerja dari para implementor. Akuntabilitas menyangkut pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat. Setiap implementor mempunyai tugasnya masing-masing sehingga harus bertanggungjawab terhadap tugasnya bukan dengan menyerahkan tugasnya kepada implementor lain. Program penataan bantaran sungai di kawasan Brigjen Katamso dilaksanakan oleh berbagai implementor yang ahli dibidangnya. Oleh karena itu implementor harus mampu melaksanakan tugasnya, karena mereka mempunyai bagiannya masing-masing. Dengan melaksanakan tugas sesuai porsi atau kapasitasnya berarti implementor sudah melaksanakan tanggungjawabnya sebagai agen

pelaksana implementasi program tersebut.

b. Komitmen dan Kemampuan

Komitmen dan kemampuan merupakan dua prasyarat penting yang harus dimiliki oleh personel yang diberi mandat untuk mencapai tujuan dalam implementasi. Komitmen merujuk pada kesungguhan seorang implementor untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya dengan sungguh-sungguh, memiliki motivasi dari dalam dirinya untuk menjalankan tugasnya dan menggunakan segala potensi yang dimilikinya untuk mencapai hasil yang maksimal. Namun demikian, komitmen saja tidak cukup. Komitmen baru akan berkontribusi ketika implementor memiliki kemampuan atau keahlian untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang memiliki sumberdaya yang cukup tetapi kurang dari sisi tenaga ahlinya.

c. Tim Kerja

Tim kerja merupakan unsur yang tidak bisa diabaikan dalam mendukung kinerja dari sumberdaya manusia dalam organisasi. Tim kerja besar pengaruhnya terhadap kinerja implementor dikarenakan dalam tim kerja memiliki karakteristik yang kuat yaitu, tujuan kolektif, bersinergi secara positif, akuntabilitas secara pribadi maupun mutual dan adanya keahlian yang bersifat komplementer diantara sesama

anggota. Anggota yang tergabung dalam tim kerja dituntut untuk memiliki rasa solidaritas serta tanggungjawab yang tinggi. Tim kerja yang tidak solid akan mempengaruhi pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Bila hal ini terjadi tentu hasil dari pekerjaan yang dikerjakan tersebut tidak akan maksimal. Tim kerja dalam program penataan bantaran sungai di kawasan jalan Brigjen Katamso Kabupaten Sintang ini terdiri dari pimpinan proyek dan tim teknis dari dinas Pekerjaan Umum. Kemudian adalah forum dialog/diskusi yang dilakukan oleh tim teknis bersama masyarakat, LSM, pemda serta dinas/ instansi terkait dalam pelaksanaan program tersebut.

d. Koordinasi dan Interaksi antar Aktor

Jenis implementasi yang menggunakan struktur multi organisasi memiliki konsekuensi bahwa koordinasi antar unit organisasi dan aspek kerjasama antar aktor menjadi sangat penting. Agar koordinasi dapat dilakukan dengan baik maka seluruh *stakholder*, terutama penanggung jawab utama implementasi harus memahami mekanisme kerja yang akan melibatkan seluruh *stakholder* yang terlibat dalam implementasi. Mekanisme kerja yang dilakukan dalam implementasi program penataan bantaran sungai di kawasan jalan Brigjen Katamso dimulai dari penanggungjawab proyek selaku pimpinan, kemudian

ada pimpinan pelaksana yang membawahi tenaga ahli, staf ahli dan tenaga pendukung. Penanggungjawab proyek dan pimpinan pelaksana saling berkoordinasi dengan staff administrasi dan keuangan agar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai harapan. Koordinasi dan interaksi yang dilakukan dalam implmentasi program penataan bantaran sungai di kawasan jalan Brigjen Katamso menjadikan implementasi tersebut terarah. Sehingga setiap aktor / implementor yang terlibat mampu menyesuaikan kemampuan yang ada pada dirinya dengan implementor lainnya.

e. Keterlibatan Pihak Swasta

Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan penataan ruang emnyebabkan pihak swasta harus ikut andil dalam implementasi kebijakan tersebut. Selama ini pengerjaan proyek-proyek yang ada di dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang selalu melibatkan pihak swasta atau pihak ketiga seperti pemborong maupun perusahaan kontraktor. Hal ini dikarenakan kemampuan dari para pegawai serta kapasitas pegawai yang ada di dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang dirasakan kurang memadai.

f. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat akan perlunya menjaga kelestarian lingkungan sangatlah perlu. Penataan ruang dilakukan untuk

menjaga kelestarian antara lingkungan alam dengan manusianya. Kondisi lingkungan yang berada ditepian sungai seharusnya membuat masyarakat menyadari perlunya menjaga kawasan tersebut supaya terhindar dari bencana yang tidak diinginkan.

Kondisi pantai yang kotor, tepian jalan yang kumuh dan padat oleh pedagang kaki lima serta akses jalan yang sempit juga diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan dan ruang. Masyarakat hanya peduli bagaimana mereka dapat menghasilkan uang untuk kehidupan mereka di kawasan yang padat tersebut. Oleh karena itu dinas Pekerjaan Umum harus bisa berkoordinasi dengan dinas lain yang turut andil dalam masalah tersebut seperti dinas kebersihan dan dinas sosial. Dengan koordinasi maupun kerjasama antar dinas penataan bantaran sungai dikawasan Brigjen Katamso akan membuahkan hasil yang baik dan memuaskan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Sebagai akhir dari tulisan artikel ini, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang mempengaruhi implementasi implementasi program penataan bantaran sungai di kawasan jalan Brigjen Katamso kabupaten Sintang seperti sumberdaya yang belum maksimal terutama dari sumberdaya manusianya, koordinasi dan komunikasi antar implementor yang tidak baik serta sikap kecenderungan agen pelaksana yang kurang serta kondisi lingkungan tempat

pelaksanaan program yang harus kondusif baik sebelum penataan, pada saat penataan dan setelah penataan. Proses implementasi program penataan bantaran sungai di kawasan jalan Brigjen Katamso juga dipengaruhi oleh hal lain seperti kondisi tim kerja, koordinasi dan interaksi para pelaksana, keterlibatan pihak swasta, komitmen pemerintah dan juga kesadaran masyarakat akan pentingnya penataan ruang. Pemerintah Kabupaten Sintang melalui dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang telah mengkaji konsep penataan yang sesuai untuk kawasan bantaran sungai di jalan Brigjen Katamso Kabupaten Sintang. Dalam penataan bantaran sungai di kawasan jalan Brigjen Katamso Kabupaten Sintang terdapat beberapa hambatan seperti masalah legalitas kepemilikan tanah, kesanggupan pemerintah dan masyarakat sekitar serta rapatnya bangunan di kawasan tersebut. Adanya dampak positif dan negatif akibat dari pelaksanaan program penataan bantaran sungai di kawasan jalan Brigjen Katamso Kabupaten Sintang.

2. Saran

Pemerintah Kabupaten Sintang terutama dinas Pekerjaan Umum perlu meningkatkan sumberdaya terutama sumberdaya manusianya supaya mempunyai tenaga yang ahli dibidangnya, meningkatkan koordinasi antar pelaksana implementasi program penataan ruang. Pemerintah daerah Kabupaten Sintang dan dinas Pekerjaan Umum harus mempunyai komitmen dalam menyelesaikan masalah penataan ruang yang ada di Kabupaten Sintang dengan penataan bantaran sungai sebagai permulaannya. Pemerintah Kabupaten Sintang dan dinas Pekerjaan Umum perlu mempertegas kejelasan wewenang pada implementor kebijakan agar kebijakan yang di susun dapat

mengakomodir kebutuhan masyarakat. Kondisi bantaran sungai di kawasan Brigjen Katamso yang tidak teratur memerlukan penataan yang baik dan rinci oleh dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang sehingga kawasan tersebut nantinya dapat menjadi kawasan strategis yang dalam jangka waktu yang panjang dapat menjadi objek wisata potensial.

F. REFERENSI

- Agustino, Leo. 2008. **Dasar – Dasar Kebijakan Publik**. Bandung: PT. Alfabeta.
- Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. **Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)**. Yogyakarta: Gava Media.
- Farid Ali, Andi Syamsu Alam, Sastro M. Wantu. 2012. **Studi Analisa Kebijakan (Konsep Teori dan Aplikasi Sempel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah)**. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Moleong, J. Lexy, 2000. **Metode Penelitian Kualitatif**. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mangkunegara Anwar Prabu. 2005. **Evaluasi Kinerja SDM**. Bandung: PT. Refika Aditama
- Nugroho, Riant. 2004. **Kebijakan Publik**. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- , 2012. **Public Policy**. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2010. **Teori Administrasi Publik**. Bandung: Alfabeta.

Silalahi, Ulber, 2009. **Metode Penelitian Sosial**. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. 2008. **Metode Penelitian Administrasi**. Bandung: Alfabeta.

-----, 2011. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**, Bandung: ALFABETA.

Winarno, Budi. 2012. **Kebijakan Publik**. Jakarta: PT. Buku Seru.

-----, 2012. **Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)**. Yogyakarta: CAPZ.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A. Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Aya Ismaya
NIM / Periode lulus : E01110035 / 2014
Fakultas/Jurusan : ISIPOL/ Ilmu Administrasi / IAN
E-mail address/HP : ayaismaya@gmail.com / 085252164501

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi.....*) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Implementasi Program Penataan Bantaran Sungai Di Kawasan
Jalan Brigjen Katamsa Kabupaten Singang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☐ secara *fulltext*
☐ *content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal17-2014

Dr. Arifin, M. AB
NIP. 197105021977021002

Dibuat di :
Pada tanggal:

Aya Ismaya
(nama terang dan tanda tangan mhs)

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).